

Daftar Pustaka

Litteratur

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu : Sinar Grafika.
- Amiryddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, Grup.
- Atif, Bada Nawawi. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (integrated justice system)*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Chaerudin Dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adam . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danil, Elwi. 2004. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Cet. II Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- _____. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanitijo, R.Soemitro. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimerri*. Jakarta: Ghali Indonesia Persada.
- Istanto, F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Ganda.
- J.Moleong, Lex. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Marzuki, Peter Muhmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mucshin. 2010. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Independence Judiciary)*. Surabaya: Untag Press.
- Mulyad, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- _____. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Moch. Faisal Salam, 2007, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Intergralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Sianturi S.R. 2012. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono . 1986. *Pengantar Sosiologi Kelompok*. Bandung : Remaja Karya.
- _____. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Cetakan Kelima: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- _____. 2007. *Faktor-Faktor yang memepengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press.
- Soekanto, Soedarjo. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zulkarnain. 2013. *Peraktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Tesis/ Jurnal/ Artikel**
- Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHI, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).
- Slamet Sarwo Edy, *Desertasi: Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi tentang struktur peradilan militer di Indonesia)*, Yogya: UGM

I.Gst Ngr Hady Purnama Putera, *GAGASAN PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY DALAM KONSEP KUHP ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KORPORASI*, Jurnal UGM Vol.2 No.1 hlm 4

Ishar Elmi, *Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer*, Cita Hukum Vol. 1 No. 2, 2013, hlm 14

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

_____, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.

Internet

<http://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/> wewenang diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 08.010 wib

